

***Strategy Implementation of Programs of Nahdlatul Ulama Regional Board
(PWNU) West Java Province in Serving the Umat***

***Implementasi Strategi Program Kerja Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
(PWNU) Provinsi Jawa Barat dalam Melayani Umat***

Dasuki

dasuki1977@gmail.com
universitas ars Bandung

Acep Rohendi

arohendi@ars.ac.id
universitas ars Bandung

Rian Andriani

rian_andriani@ars.ac.id
universitas ars Bandung

Abstract: Nahdlatul Ulama as an organization based on traditional society and pesantren that adheres to the ideology of Ahlus Sunnah wal Jama'ah aims to help to create a just society, welfare of the people and public good. Therefore, to realize Nahdlatul Ulama's goals, its movement then covers several areas of community services including religious, social, educational, economic and other fields. The aim of this research is to find out and analyze how strategy implementation of programs from the Regional Board of Nahdlatul Ulama (PWNU) West Java Province is implemented in optimizing its services to the people. The method used in this research is qualitative. In this research, the research subjects were the Organization Board of PWNU, both from the Syuriyah and Tanfidziyah, the Board of Lembaga and Banom and jama'ah related to the implementation of community service programs. Based on the research results, it shows that the implementation strategy of the work programs carried out by the Board of PWNU has experienced relatively a lot of progress, including in terms of organizational management, however, it still faces challenges in efforts to modernize its organizational governance in a more professional manner. So, some optimizations are needed to improve organizational governance in the future so that various community service programs can be maximized.

Keywords: *Strategy Implementation, Programs and Services*

Abstrak: Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang berbasis kalangan tradisional dan pesantren yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah bertujuan untuk ikut mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan terciptanya rahmat bagi semesta. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan Nahdlatul Ulama tersebut, pergerakannya kemudian meliputi

beberapa bidang pelayanan umat, di antaranya bidang agama, sosial, pendidikan, ekonomi dan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi strategi Program Kerja Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Barat dalam optimalisasi pelayanannya terhadap umat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Pengurus Harian PWNU Jawa Barat, baik dari jajaran Syuriah maupun Tanfidziyah, Pengurus Lembaga dan Badan Otonom di lingkungan PWNU Jabar serta Jama'ah yang terkait dengan pelaksanaan program pelayanan umat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi program kerja yang dilakukan pengurus PWNU Jawa Barat mengalami relatif banyak kemajuan termasuk dalam hal pengelolaan berorganisasinya, namun demikian masih menghadapi tantangan dalam upaya melakukan modernisasi tata kelola organisasinya secara lebih profesional. Sehingga dengan demikian diperlukan berbagai optimalisasi perbaikan tata kelola organisasi kedepannya sehingga berbagai program pelayanan umat lebih maksimal lagi.

Kata Kunci: Implementasi Strategi, Program Kerja dan Pelayanan.

A. PENDAHULUAN

Organisasi merupakan keseluruhan perpaduan unsur manusia dan non manusia yang masing-masing memiliki fungsi dalam mencapai tujuan untuk mencapai kinerja yang menjadi arah tujuan dalam sistem sosial (Suryadi, 2010). Istilah organisasi secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu kesatuan orang-orang yang tersusun dengan teratur berdasarkan pembagian tugas tertentu (Angelya et al., 2022). Dalam hal ini, untuk mencapai tujuan organisasi, maka diperlukan pemikiran yang kritis dan selalu maju untuk terus berubah dalam menyesuaikan dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, organisasi diharapkan mampu untuk beradaptasi dalam berbagai perubahan yang ada di lingkungannya dan dijadikan tantangan untuk mengembangkan kemampuan profesional organisasi dalam rangka mengefektifkan sistem yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan melakukan pengembangan organisasi (Hadi et al., 2023).

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan mempunyai sejarah yang panjang. Organisasi ini pertama kali berdiri pada 31 Januari 1926 atau bertepatan dengan 16 Rajab 1344 H (Idris, 2015). Nahdlatul Ulama hadir melintasi berbagai zaman, sejak masa kolonialisme Belanda, penjajahan Jepang, pasca-kemerdekaan Orde Lama, era pembangunan Orde Baru, dan masa demokrasi Reformasi sekarang ini. Dalam lintasan zaman yang terus berubah itu, satu hal yang pasti, ormas-ormas Islam telah memberikan kontribusi besar bagi proses pembangunan di Indonesia.

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Nahdlatul Ulama hasil Mukhtamar ke-34 di Bandar Lampung pada tahun 2021 disebutkan dalam Pasal 8 bahwa tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta (Khotimah, 2023).

Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan Nahdlatul Ulama tersebut, pergerakannya kemudian terbagi kedalam beberapa bidang, di antaranya bidang agama, sosial, pendidikan, dan ekonomi.

Ahlu Sunnah Wa al-Jama'ah yang dianut oleh Nahdlatul Ulama menekankan pada tiga aspek ajaran agama Islam, yakni akidah, fikih dan tasawwuf. Dalam akidah, Nahdlatul Ulama mengikuti pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Nahdlatul Ulama juga menganut paham 4 madzhab yaitu madzhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan Maliki dalam hal fikih. Sedangkan pada hal tasawwuf, NU mengikuti paham yang dikembangkan oleh Abu Hamid al-Ghazali dan Al-Juwaini al-Baghdad (Yon Machmudi, 2013: 86).

Posisi ini tetap akan menjadikan perjuangan NU dalam mewujudkan kebaikan masyarakat (*Khoiro Ummah*). Apalagi platform yang menjadi landasan semangat perjuangan sebagai gerakan sosial-keagamaan adalah Islam. Dengan konsep pemahaman Islam sebagai agama fitrah dan rahmat bagi semesta alam tentunya tidak hanya mengurus hubungan masyarakat muslim (*ukhuwah Islamiyah*) tapi juga hubungan antar sesama warga bangsa (*ukhuwah wathaniyah*) dan hubungan antar manusia (*ukhuwah basyariyah*). Untuk melakukan optimalisasi pencapaian usaha-usaha tersebut diatas baik di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi dan lainnya maka dibutuhkan manajemen pengelolaan organisasi secara profesional (Chamidi et al., 2021).

Penelitian terkait dengan tata kelola atau manajemen organisasi ini masih sulit didapatkan. Salah satunya adalah Skripsi karya Monalisa (2019) yang berjudul *Fungsi Manajemen pada Pengelolaan Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dalam Meningkatkan Dakwah di Kota Parepare*. Namun demikian skripsi ini hanya sekilas saja membahas terkait manajemen yang terkait dakwahnya, tidak membahas secara mendalam mengenai dinamika pengelolaan organisasinya.

Penulis yang sudah 4 periode (hampir 20 tahun) sebagai Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Barat memahami betul bahwa selama ini PWNU Jawa Barat berusaha mengimplementasikan apa yang menjadi tujuan dan usaha-usaha Nahdlatul Ulama secara umum. Namun kendala di lapangan masih kurang optimal terutama terkait manajemen organisasi.

Sebagai organisasi yang berbasis kalangan tradisional dan pesantren, Nahdlatul Ulama masih menghadapi tantangan dalam upaya memodernisasi tata kelola organisasinya.

Disisi lain juga, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan yang sifatnya non-profit menghadapi kendala pada optimalisasi kinerja pengurus yang memang hanya disandarkan pada loyalitas ideologis keagamaan, tanpa *reward* dan *punishment* yang terukur, sehingga dengan demikian diperlukan strategi manajemen dalam mengatasi hal tersebut.

Oleh karena itu maka penulis tertarik membuat penelitian tesis dengan judul **"Implementasi Strategi Program Kerja Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Barat dalam Pelayanan Umat "**

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) (Arikunto, 2010). sehingga peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif (Moleong, 2007). dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi* (Sahir, 2021). Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat Jalan Terusan Galunggung No. 9 Kota Bandung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kebijakan Organisasi PWNU Jawa Barat

Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah (perkumpulan) terbesar di dunia dengan jutaan anggota, ribuan pengurus yang menjalankan organisasi mulai tingkatan anak ranting, ranting, majelis wakil cabang, cabang, wilayah, pusat dan badan otonomi (Banom) maupun Lembaga NU, adalah potensi yang besar untuk dapat dikelola dengan baik (Ronika, 2023).

Memasuki satu abad jam'iyah NU memiliki dua agenda besar yakni membangun kemandirian warga dan meningkatkan peran dalam pergulatan NU untuk mendukung perdamaian dunia, agenda besar NU tersimpul dalam kalimat sarat makna "Merawat Jagad, Membangun Peradaban".¹

Di dalam Mukhtamar ke-34 Lampung, bahwa rencana kerja satu abad NU terdapat empat program prioritas untuk lima tahun kedepan. Keempat program pokok ini sangat penting dan menjadi program prioritas NU, yakni memperkokoh transformasi pemahaman Ahlussunnah Wal Jamaah Nahdliyah, pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) NU, kemandirian ekonomi untuk kesejahteraan, serta penguatan organisasi kelembagaan dan jaringan.

Dalam rapat kerja wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat I, disusun Pokok-pokok Program 5 (lima) tahun masa khidmat 2021-2026. Pokok-pokok Program ini memperhatikan dan merujuk kepada hasil Konferensi Wilayah XVIII Nahdlatul Ulama Jawa Barat dan Garis Besar Program Nahdlatul Ulama hasil Mukhtamar Ke-34 NU di Lampung. Disamping itu, Pokok-pokok Program ini juga berdasarkan hasil analisis PWNU Jawa Barat.

4.2. Visi, Misi, Tujuan, Isu Strategis dan Program Dasar PWNU Jawa Barat

A. VISI

Pada Tahun 2026 PWNU Jawa Barat, Menjadi Jami'yyah Diniyah Islamiyah Ijtima'iyah terdepan dalam kemajuan pendidikan, mandiri dalam perekonomian yang berkeadilan, terwujudnya kemaslahatan masyarakat khususnya warga NU

¹ Wawancara dengan Ketua PWNU Jawa Barat KH. Juhadi Muhammad pada tanggal 14 Februari 2024 bertempat di Gedung Dakwah PWNU Jawa Barat.

serta terciptanya peradaban Islam rahmat di Jawa Barat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. MISI

1. Melakukan berbagai upaya penguatan kapasitas kelembagaan (*capacity building*) menuju organisasi yang mandiri.
2. Mengupayakan penguatan kapasitas individu (*individual capacity*) jajaran pengurus dan jajaran perangkat dalam mewujudkan individu pengurus yang terampil dan cerdas dalam melayani umat.
3. Meningkatkan dan menguatkan karakter aswaja dan nasionalisme warga NU (*character building*) secara terencana, sistematis dan terstruktur bagi seluruh warga Nahdlatul Ulama.
4. Memberdayakan berbagai aset yang ada untuk mempercepat terwujudnya kemandirian organisasi dan kemaslahatan warga NU.
5. Mendorong terwujudnya kemandirian lembaga-lembaga NU dilingkungan Nahdlatul Ulama.
6. Mendorong kemandirian warga NU baik secara: ekonomi, sosial, politik, budaya maupun Pendidikan.
7. Merapikan barisan dan gerak langkah perjuangan NU serta semangat pengabdian dilingkungan PWNU Jawa Barat.

C. TUJUAN

1. Menguatkan sistem organisasi dan kelembagaan.
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Menguatkan karakter Ahlussunnah Wal Jama'ah berwawasan kebangsaan.
4. Mengembangkan kemaslahatan sosial-budaya.
5. Menguatkan sektor ekonomi jam'iyah dan jama'ah.
6. Menguatkan sektor pendidikan menuju pendidikan yang unggul.
7. Mengembangkan sektor pertanian bagi warga NU.
8. Meningkatkan layanan kesehatan berstandar NU.
9. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

PWNU Jawa Barat beraktivitas berlandaskan amanat hasil konferensi wilayah tahun 2021 yang telah menetapkan berbagai program khidmat NU Jawa Barat. Berbagai program diharapkan dirasakan masyarakat baik dakwah, pengabdian sosial, kesehatan dan pendidikannya.²

Mengimplementasikan dan lebih membumikan lagi *Sembilan Arah dan Kebijakan Strategis NU* yang ditetapkan Mukhtamar Lampung pada tingkat Jawa Barat, yaitu:

1. Membangun masyarakat yang cerdas atau *well-educated*. Dengan revitalisasi institusi dan sistem pendidikan di kalangan NU, maka kita akan bisa mencetak santri dan kader yang siap menghadapi tantangan nasional dan global

² Wawancara dengan H. Iwan Alamsyah Wakil Ketua PWNU Jawa Barat pada tanggal 14 Februari 2023

2. Membangun masyarakat yang etis, bukan elitis. Program kerja NU harus berlandaskan nilai etika Islam.
3. Membangun masyarakat yang menghormati keragaman. Pada abad keduanya, NU akan berinteraksi dengan seluruh elemen masyarakat dalam berbagai agama, etnik, suku bahkan negara. Tanpa menerima keragaman ini, program kerja NU menuju Abad Kedua akan sulit direalisasikan. NU harus menjadi rahmat bagi semesta.
4. Membangun masyarakat yang lepas dari penjajahan/perbudakan. Program Kerja NU harus berusaha menumbuhkan sistem organisasi dan jiwa manusia yang merdeka dari penjajahan modern. Maka kemandirian menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan NU memasuki Abad Kedua.
 1. Membangun masyarakat dakwah yaitu mengajak pada kebaikan, bukan kerusakan. Semua program kerja NU memasuki 100 tahun yang kedua harus bercirikan pada dakwah, bukan menghakimi apalagi membuat kerusakan pada mereka yang berbeda.
 2. Membangun masyarakat yang berkeadilan sosial. Program Kerja NU memasuki Abad Kedua harus berusaha melawan berbagai ketimpangan sosial.
 3. Membangun masyarakat yang mengedepankan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Maka program kerja NU memasuki Abad Kedua nanti tetap harus mengandalkan musyawarah. Kepemimpinan NU akan bersifat kolektif kolegial, dimana semua kader dan SDM terbaik akan dilibatkan dalam semua aktifitas NU.
 4. Membangun masyarakat yang selalu bersikap tawasuth (moderat). Memasuki era 4.0, 5.0 dan selanjutnya maka NU harus tetap istiqomah bersikap tawasuth. Program kerja NU juga harus mencerminkan ciri tawasuth baik dari aspek perencanaan, implementasi dan evaluasinya.
 5. Membangun masyarakat yang ber-amar *ma'ruf nahi munkar*. NU harus tetap istiqomah mendesain program kerja memasuki abad keduanya dengan selalu berpihak pada masyarakat yang lemah, tertindas dan terzalimi baik secara hukum maupun ekonomi. NU menolak cara-cara yang munkar dalam menolak kemunkaran. Semuanya harus dilakukan secara *ma'ruf*.

Hasil pencapaian berbagai program kerja yang dilakukan oleh jam'iyah NU diharapkan tumbuhnya kecintaan jamaah, kaum muslimin dan masyarakat kepada Nahdlatul Ulama, khususnya di Jawa Barat. Kencintaan ini dapat menjadi kecintaan jangka panjang baik lingkungannya, keluarganya bahkan pada tempat kerjanya.

Semua layanan yang bernilai dan berkualitas tersebut dapat dirasakan oleh para jamaah, dan masyarakat pada umumnya maka akan tercipta loyalitas jamaah, kaum muslimin dan masyarakat terhadap berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh jamiyyah NU serta hal ini akan mempermudah meluaskan dakwah ajaran yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama.

Lima Kelompok Bidang Program Kerja PWNU Jawa Barat³ **Bidang Keagamaan dan Dakwah**

Penanaman dan pembumian Aswaja an-Nahdliyah di bumi Jawa Barat. Untuk itu menjadi prioritas bagi NU sebagai jam'iyah agar menguatkan Kembali pemahaman

³ Wawancara dengan Wakil Sekretaris PWNU Jawa Barat H. Dindin C. Nurdin pada tanggal 25 April 2024 bertempat di Gedung Dakwah PWNU Jawa Barat.

kepada warga NU terhadap dasar-dasar rujukan tradisi dan amaliah NU. Penyebaran Aswaja juga harus dilakukan pada eksternal NU, ditujukan pada pihak-pihak di luar NU yang selama ini masih belum memahami tentang Ahlussunnah Wal Jamaah an-Nahdliyyah.

Pendidikan dan Kebudayaan

Kerangka Pendidikan dan kebudayaan yang dibangun di NU dalam rangka membentuk karakter manusia Aswaja yang memiliki cara berfikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran maupun nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyah. Pendidikan juga dimaksudkan untuk melahirkan manusia yang berkepribadian Indonesia, berakhlak mulia, cerdas, terampil dan berguna bagi kemaslahatan diri, keluarga dan umat. Memberdayakan lembaga pendidikan dan pesantren guna meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang menguasai Iptek dan berakhlakul karimah

Ekonomi dan Kesejahteraan

Mewujudkan pemberdayaan ekonomi keumatan dan ikut mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan di lingkungan jamaah NU, dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya.

Orientasi pengembangan perekonomian NU melalui berbagai program aksi maupun advokasi harus bertumpu pada pemenuhan kebutuhan dasar warga. Selain itu juga harus ditujukan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sosial Kemasyarakatan

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Menumbuhkan budaya demokrasi yang jujur dan adil. Mendorong kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kebutuhan mutlak di tengah persaingan lokal, nasional dan global. Dalam konteks internal NU, pengembangan SDM juga terkait dengan peningkatan kapasitas pengelolaan organisasi. Oleh karenanya upaya peningkatan baik kualitas maupun kuantitas kaderisasi di lingkungan NU Jawa Barat wajib dilakukan, dari mulai kaderisasi tingkat dasar, PD-PKPNU (Pendidikan Dasar – Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama), kaderisasi menengah yaitu PMKNU (Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama) dan Pendidikan tingkat lanjut yaitu AKN-NU (Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama).⁴

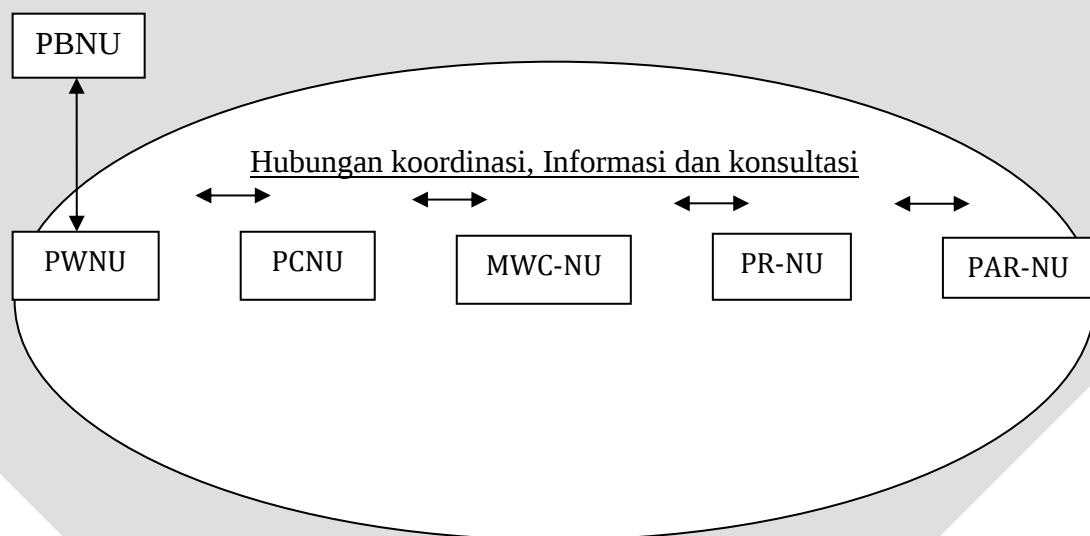
Peningkatan kapasitas kelembagaan juga harus terus diupayakan baik di tingkat PWNU, PCNU, MWC, Ranting bahkan Pengurus Anak Ranting. Keberadaan program KARTANU yang masih belum ada kejelasan tidak lanjutnya juga harus dikawal guna proses pendataan warga NU yang lebih massif lagi.

⁴ Wawancara dengan Ketua PWNU Jawa Barat KH. Juhadi Muhammad pada tanggal 14 Februari 2024 bertempat di Gedung Dakwah PWNU Jawa Barat.

4.3. Prosedur Tata Kelola dan Tata Hubungan Organisasi PWNU Jawa Barat

4.5.1. Tata Hubungan Organisasi

Pengurus wilayah (PW) merupakan perangkat organisasi Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama dan Pengurus Cabang (PC) merupakan perangkat organisasi Pengurus Cabang Nahdatul Ulama. Hubungan organisasi dari tingkat wilayah sampai anak ranting digambarkan sebagai berikut:



Hubungan yang digambarkan anak panah tersebut adalah hubungan **koordinatif, informatif, dan konsultatif**.

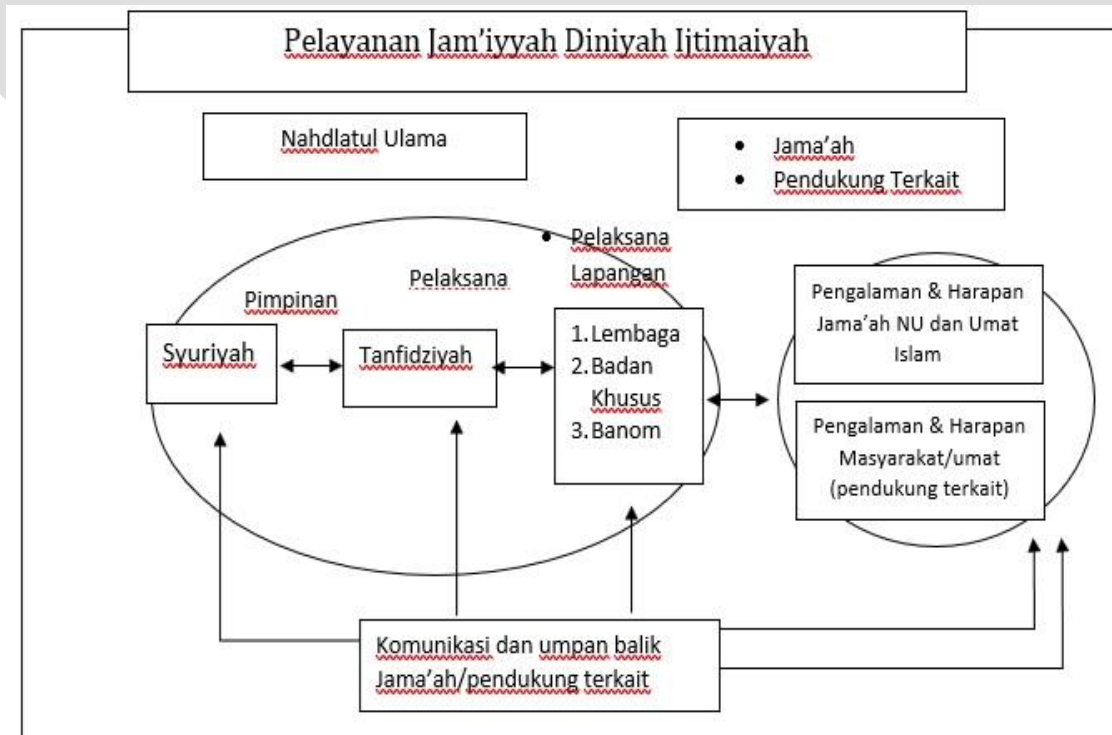
Hubungan Koordinatif : adalah hubungan koordinasi dari tingkatan yang lebih tinggi kepada tingkatan dibawahnya yang merupakan kastamer utama

Hubungan informatife : hubungan timbal balik yang saling memberikan informasi yang diperlukan

Hubungan konsultatif : hubungan konsultasi dari tingkatan yang lebih bawah kepada setingkat atau tingkat di atasnya.

- Badan otonom diatur oleh peraturan Dasar dan peraturan rumah Tangga Masing-masing. Namun setiap pelaksanaan kegiatan yang melibatkan segenap warga NU yang menjadi anggota Badan Otonom (konferensi, raker, muker dan lain-lain) harus di laporkan kepada pengurus NU pada tingkatannya, baik sebelum maupun sesudah kegiatannya; baik tertulis maupun lisan. Bila tidak di laporkan NU pada tingkatannya berhak memanggil Badan Otonom yang bersangkutan untuk menjelaskannya.
- Lembaga dan Badan Khusus adalah perangkat Nahdlatul Ulama yang diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada Pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkatannya.
- Hubungan organisasi antara Pengurus Lembaga dan Lajnah pada satu tingkatan dengan tingkatan lainnya adalah bersifat koordinatif.
- Hubungan organisasi antara pengurus lembaga dan lajnah pada satu tingkatan lainnya pada tingkat kepengurusan yang sama adalah bersifat konsultatif.

- e. Khidmat NU kepada umat, bentuk layanannya dapat digambarkan sebagai berikut:



Pelayanan jam'iyah Diniyah Ijtimaiah ini merupakan tata kerja PWNU yang merupakan ketentuan tentang aturan dan alur kerja pelaksanaan tugas dan wewenang unsur PWNU untuk menciptakan kelancaran dan efisiensi kerja.

Syuriah sebagai komponen dominan dalam matarantai struktur jam'iyah NU, sebagai pimpinan tertinggi dalam level organisasi, mendapatkan masukan langsung dari jama'ah NU, masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Syuriah PWNU adalah pimpinan tertinggi PWNU yang dipimpin oleh Rois Syuriah dan wakil Rois

Mustasyar adalah personalia PWNU yang mempunyai tugas dan wewenang memberikan arahan, pertimbangan, nasehat, baik secara perorangan maupun kolektif kepada syuriah dan tanfidziyah PWNU

A'wan adalah personalia PWNU yang mempunyai tugas umum dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas PW syuriah, merumuskan dan melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan kepada anggota A'wan.

Tanfidziyah adalah sebagai pelaksana dari semua kebijakan dan keputusan syuriah, juga menerima masukan dari jam'ah NU, masyarakat dan pihak terkait lainnya. Tanfidziyah adalah pelaksana tugas-tugas organisasi PWNU yang dipimpin oleh Ketua dibantu oleh beberapa wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa wakil sekretaris, serta Bendahara dan beberapa wakil bendahara.

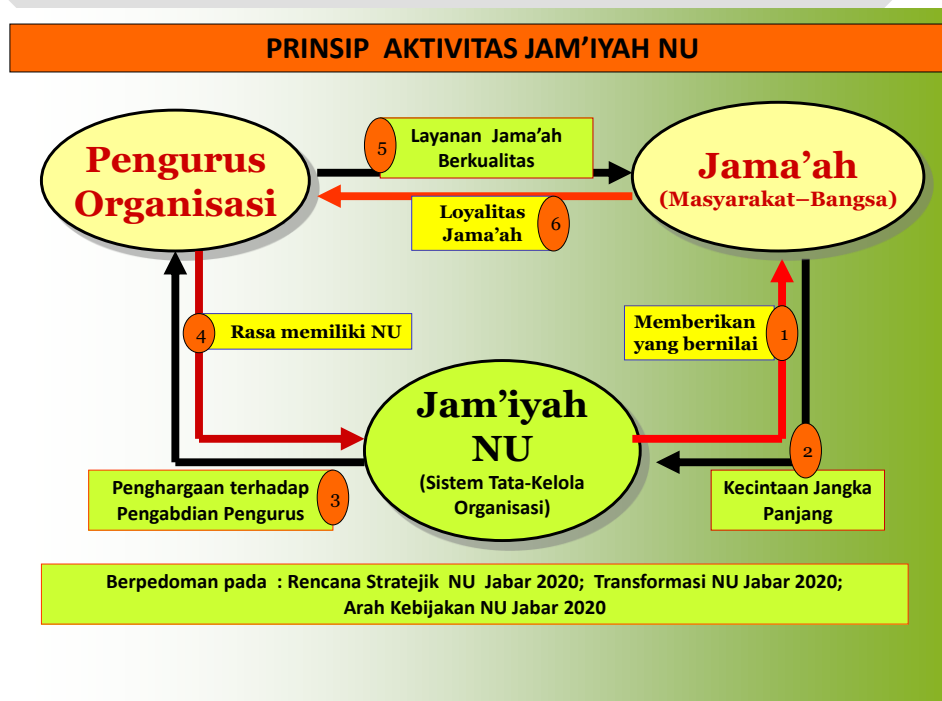
Lembaga, Lajnah dan Banom sebagai pelaksana lapangan dalam bidang tertentu, yang langsung berhadapan dengan jama'ah NU dan masyarakat pada bidang garapannya

serta juga dari pihak terkait lainnya selalu menerima berbagai masukan, harapan, keinginan, nasehat, persepsi dan tuntutan mereka.

- a) Lembaga PWNU adalah perangkat departemental organisasi PWNU yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan PWNU dengan suatu bidang tertentu
 - b) Badan Khusus PWNU adalah perangkat organisasi PWNU untuk melaksanakan program PWNU yang memerlukan penanganan khusus
 - c) Badan otonom PWNU adalah perangkat organisasi PWNU yang berfungsi melaksanakan kebijakan PWNU yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.
1. Masukan-masukan tadi dapat didiskusikan dengan Tanfidhiyah untuk dapat dibuatkan kebijakan dan langkah memenuhi kebutuhannya. Koordinasi, informasi serta konsultasi ini sangat menentukan kualitas kebijakan dan keputusan dalam pelaksanaan selanjutnya.
 2. Koordinasi, informasi dan konsultasi antara tanfidhiyah dan syuriah memegang kunci utama, karena hal-hal yang bersifat kebijakan berbasis tuntunan syariah, baik muammalah ijtimaiah maupun siyasah. Hal ini merupakan pegangan bagi pelaksana lapangan.

1.5.2. Prinsip Aktivitas Jam'iyah NU

Sebelum membahas Arah kebijakan Strategis NU Wilayah Jawa Barat dalam mencapai Visi, misi, tujuan dan sasarannya, perlu dikemukakan prinsip utama aktivitas jam'iyah NU Jawa Barat yang dapat digambarkan sebagai berikut:⁵



⁵ Wawancara dengan Wakil Sekretaris PWNU Jawa Barat H. Dindin C. Nurdin pada tanggal 25 April 2024 bertempat di Gedung Dakwah PWNU Jawa Barat.

1. Jam'iyah NU beraktivitas berlandaskan amanat hasil konferensi wilayahnya, pada hasil konferensi wilayah telah dihasilkan rencana strategik NU Jawa Barat dan Transformasi NU Jawa Barat serta mempunyai program khidmah NU Jawa Barat. Apabila program tersebut dapat dikomunikasikan dan dapat dilaksanakan dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat, baik dakwah, pengabdian sosial, kesehatan maupun pendidikannya.
2. Dampaknya adalah kecintaan jamaah, kaum muslimin dan masyarakat kepada Nahdatul Ulama. Kecintaan ini dapat menjadi kecintaan jangka panjang baik lingkungannya, keluarganya maupun pada tempat kerjanya.
3. NU terhadap pengurus dan kadernya mampu memberikan peningkatan dan pengembangan potensinya, memberikan penghargaan, pengakuan dan terus memelihara mereka dengan santun dengan berbagai penghargaan (sanjungan, tanda penghargaan dll), maka NU telah menghargai sumberdaya manusia di dalamnya. Hal ini akan menjadikan kerukunan, kebersamaan dan terjadinya integritasi internal
4. Ketika mereka dihargai, tidak ada konflik internal maka akan terjadi pada para pengurus dan kader NU rasa memiliki NU, sebagai organisasi yang harus terus diperjuangkan.
5. Langkah memperjuangkan dengan memberikan layanan terbaiknya kepada jamaah, komunitas muslimin dan masyarakat dengan berkualitas dan bernilai.
6. Akhirnya semua layanan yang bernilai dan berkualitas tersebut dapat dirasakan oleh para jamaah, komunitas muslimin dan masyarakat terhadap berbagai keputusan, ajaran yang dibawa oleh Nahdatul Ulama.⁶

1.6. Perumusan Anggaran PWNU Jawa Barat

Prinsip utama tata kelola keuangan organisasi adalah "Transparansi dan Akuntabilitas". Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, diperlukan perangkat:

- a. Perencanaan Program dan Anggaran
- b. Pelaksanaan (Proses Administrasi dan Pencatatan)
- c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan (Nurismail et al., 2024). Dalam era yang semakin dinamis, pendamping sosial memiliki peran krusial dalam mendukung pengembangan usaha bagi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan atau komunitas yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Melalui strategi manajemen yang tepat, pendamping sosial dapat membantu individu atau kelompok usaha dalam mengembangkan potensi mereka agar lebih mandiri dan berdaya saing (Ridwansyah et al., 2023).

Langkah pertama dalam strategi pendampingan adalah melakukan identifikasi potensi dan kebutuhan. Pendamping sosial perlu memahami kondisi ekonomi, sumber daya yang tersedia, serta kendala yang dihadapi oleh kelompok dampingan. Proses ini penting untuk menentukan pendekatan yang tepat dalam membantu mereka mengembangkan

⁶ Wawancara dengan Ketua PWNU Jawa Barat KH. Juhadi Muhammad pada tanggal 14 Februari 2024 bertempat di Gedung Dakwah PWNU Jawa Barat.

usaha (Fajar & Rohendi, 2017).

Selanjutnya, penguatan kapasitas menjadi aspek yang tidak kalah penting. Pendamping sosial perlu memberikan edukasi dan pelatihan kepada para pelaku usaha agar mereka memiliki keterampilan yang diperlukan dalam mengelola bisnis. Pelatihan ini mencakup aspek manajemen keuangan, pemasaran, inovasi produk, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar (Hanifa et al., 2024).

Di samping itu, akses terhadap modal dan jaringan juga menjadi faktor utama dalam keberhasilan usaha. Pendamping sosial berperan dalam memfasilitasi kelompok dampingan agar dapat memperoleh sumber pendanaan, baik melalui program bantuan pemerintah, koperasi, maupun skema kredit usaha. Tidak hanya itu, membangun jejaring dengan mitra strategis seperti lembaga keuangan, perusahaan, atau komunitas bisnis lainnya dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas (Siswanto et al., 2023). Agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan, pendampingan tidak berhenti pada tahap awal saja. Monitoring dan evaluasi secara berkala menjadi bagian integral dari strategi ini. Pendamping sosial harus terus memberikan bimbingan, mengevaluasi perkembangan usaha, serta membantu mencari solusi jika terjadi kendala dalam operasional bisnis (Purnamasari et al., 2022).

Selain itu, perancangan model bisnis yang berkelanjutan juga menjadi perhatian utama. Para pelaku usaha didorong untuk berinovasi dalam produk dan layanan mereka, serta mengembangkan strategi bisnis yang adaptif terhadap perubahan pasar. Dengan pendekatan ini, usaha yang didampingi tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar (Azhar et al., 2017).

D. PENUTUP

Program kerja PWNU Jawa Barat sudah dilakukan melalui melalui mekanisme organisasional, yaitu lewat Konferensi Wilayah, Musyawarah Kerja Wilayah dan Rapat Kerja Wilayah yang kemudian menghasilkan berbagai program pelayanan terhadap umat yang terbagi kedalam 5 (lima) kelompok bidang yaitu Bidang Keagamaan dan Dakwah (program-program pelayanan umat yang menyangkut penguatan dan pembumian Aswaja an-Nahdliyah di bumi Jawa Barat, baik ke internal maupun eksternal NU yang selama ini masih belum memahami tentang Ahlussunnah Wal Jamaah an-Nahdliyyah), Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (program-program pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang dibangun di NU dalam rangka membentuk karakter manusia Aswaja yang memiliki cara berfikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran maupun nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyah, termasuk program memberdayakan lembaga pendidikan dan pesantren guna meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang menguasai Iptek dan berakhlakul karimah, Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan (yaitu program-program kerja dalam rangka mewujudkan pemberdayaan ekonomi keumatan dan ikut mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan di lingkungan jamaah NU, dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya), Bidang Sosial Kemasyarakatan (yaitu program-program dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum yang berkeadilan) dan Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan (yaitu program-program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia terutama terkait dengan peningkatan kapasitas pengelolaan organisasi).

DAFTAR PUSTAKA

- Angelya, A. A., Saputra, E. R., Amani, N., & Hariyanto, M. (2022). Pengorganisasian dalam manajemen pendidikan. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 97–105.
- Arikunto, S. (2010). Metode peneltian. *Jakarta: Rineka Cipta*, 173.
- Azhar, R. M., Suparno, O., & Djohar, S. (2017). Pengembangan model bisnis pada lokawisata baturaden menggunakan business model canvas. *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, 12(2), 137–144.
- Chamidi, A. S., Ulfiah, U., & Nurjaman, U. (2021). Mabadi Khaira Ummah dan urgensinya di Era Industry 4.0 dan Society 5.0. *Ibtida-Jurnal Kajian Pendidikan Dasar*, 1(2), 27–39.
- Fajar, C. M., & Rohendi, A. (2017). Keadilan Organisasi, Kepuasan Kerja Dan Pemberdayaan Pegawai Yang Berdampak Pada Komitmen Organisasi. *Ikonomika: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 53–65.
- Hadi, A. F., Az-Zahra, F., & Salsabila, N. (2023). Strategi organisasi pendidikan di tingkat sekolah menengah dalam menghadapi tantangan global. *Protasis: Jurnal Bahasa, Sastra, Budaya, Dan Pengajarannya*, 2(1), 178–189.
- Hanifa, N., Susilowati, E., & Nainggolan, A. (2024). Kapasitas Warga Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. *Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Kelompok Dan Komunitas*, 2(1).
- Idris, S. (2015). pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. *KREATIF: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam*, 13(2), 148–165.
- Khotimah, K. (2023). *Kebijakan merdeka belajar dan implikasinya pada pembelajaran pendidikan aswaja dan ke-nu-an di SMP NU Syamsuddin Blimbing Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*.
- Nurismail, N. A., Rohendi, A., & Kusnadi, D. (2024). STRATEGI MANAJEMEN PENDAMPING SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN USAHA KELOMPOK BINAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN WANARAJA KABUPATEN GARUT. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 16–28.
- Purnamasari, L., Ayuniyyah, Q., & Tanjung, H. (2022). Efektivitas zakat produktif dalam peningkatan usaha mustahik (studi kasus baznas kota bogor). *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 232–244.
- Ridwansyah, R., Purwadhi, P., & Andriani, R. (2023). Pengaruh Elektabilitas Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja Terhadap Tingginya Turnover Karyawan PT. Sumi Rubber Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Kreatif*, 9(1), 92–101.
- Ronika, R. (2023). *Aksiologi Banaser*. Deepublish.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Penerbit Kbm Indonesia.
- Siswanto, S., Aksha, A. H., & Handayani, S. (2023). Relasi Negara dan Perempuan

Aswaja, Vol. 2. No. 1, Januari 2021. 01 – 120 [diedit oleh editor]

dalam Pemberdayaan: Strategi Pemberdayaan Perempuan Rentan Sosial Ekonomi oleh Dinas Sosial di Sleman Yogyakarta. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 5(1), 17–34.

Suryadi, E. (2010). Analisis Peranan Leadership Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Manajerial*, 9(1), 1–9.